

EFEKTIVITAS PELAPORAN SISTEM KEUANGAN DESA DI KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS

Siti Ramadhanti Sukmana

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia

E-mail : sitiramadhanti1@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan sistem keuangan desa maka untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparansi dan akuntabel untuk menghindari penyelewengan keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas, hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaporan sistem keuangan desa dengan memperhatikan unsur pelaksana (actor), aktivitas (activity), dan tempat (place). Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara. Penerapan pelaporan sistem keuangan desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif. Hal ini terlihat dari adanya keterlambatan pada saat menyerahkan data/berkas dari terbatas, penginputan data yang kurang teliti, pelaksana kegiatan yang kurang melakukan koordinasi, dan tidak adanya ruangan khusus bagi pelaksana kegiatan pelaporan sistem keuangan desa.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pelaporan, Sistem Keuangan Desa*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, mandiri, dan demokratis, hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu pemerintah membuat suatu aplikasi yang bisa meningkatkan tata kelola keuangan desa yang lebih transparan,

dan akuntabel untuk mengurangi penyalahgunaan uang desa. Pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas rencana penerimaan dan pengeluaran desa. Pengembangan Sistem Keuangan Desa merupakan satu bagian dari langkah yang diambil BPKB (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) untuk berperan dalam rangka Pegawaiian Keuangan Desa.

Sistem keuangan desa akan menghasilkan output RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa, Dokumen Penatausahaan keuangan desa, laporan realisasi per sumber dana, dan laporan kompilasi di tingkat pemerintah daerah.

Dalam Sistem Keuangan Desa berisi tentang beberapa pengelolaan dana desa yang dimana di dalam Pasal (1) Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan berisi tentang "Pengelolaan Keuangan Desa". Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tetapi ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang "Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa".

Di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis terdapat 11 Desa, tetapi yang memiliki permasalahan tentang Pelaporan Sistem Keuangan Desa ada 5 desa, yaitu Desa Kertabumi, Desa Karanganyar, Desa Bojongmengger, Desa Cijeungjing, dan Desa Karangkamulyan. Hal ini bagaimana dari hasil pengamatan menjelaskan bahwa Sistem Keuangan Desa belum sepenuhnya dilaksanakan

secara efektif, sehingga sering terjadi kekeliruan didalamnya. Adapun permasalahan dalam pelaporan Sistem Keuangan Desa yang dialami oleh 5 Desa, diantaranya dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Perangkat desa yang ditunjuk sebagai operator sistem keuangan desa dalam memasukkan data anggaran biaya desa untuk pelaporan keuangan masih kesulitan memahami parameter yang ada di system, sehingga untuk penginputan data seringkali terjadi kesalahan atau kurang tepat dalam memasukkan kode mata anggaran.
2. Kepala desa beserta perangkat desa belum sepenuhnya memahami standar akuntansi pemerintahan desa yang diintegrasikan dalam mengoperasikan Sistem Keuangan Desa yang berbasis kinerja.
3. Kepala desa dan Badan Permusyawatan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan tidak diikuti dengan evaluasi atas kesesuaian APBDesa dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga seringkali pemerintah desa hanya memperhatikan formalitas dibandingkan dengan proses pencapaian hasil pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Kurangnya kemampuan Kepala Desa dalam memahami Peraturan

Pemerintah No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sehingga pengambilan keputusan untuk penyelesaian pelaporan keuangan desa berdasarkan realisasi pertanggungjawaban anggaran dan belanja desa seringkali terlambat.

Penulis menetapkan fokus permasalahan sebagai berikut “Mengapa Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Cijeungjing memerlukan efektivitas pelaporan sistem keuangan desa?”. Selain itu dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana efektivitas pelaporan Sistem Keuangan desa, hambatan-hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaporan sistem keuangan desa dari ke 5 desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut (Draf, 2007: 12) menyatakan bahwa “Efektivitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan”. Sedangkan menurut Gie (2000: 24) menyatakan bahwa “Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. Selanjutnya menurut

Sedarmayanti (2009: 72) menyatakan bahwa “Efektivitas merupakan ukuran yang memberikan gambaran mengenai pencapaian untuk kerja yang maksimal dan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) dapat tercapai”. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas keadaan dan kemampuan kerja suatu organisasi untuk memberikan nilai guna yang diharapkan untuk pencapaian kerja yang maksimal untuk memenuhi target atau sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Maka jika kemampuan lebih mendekati dengan target, efektivitas pun semakin tercapai.

Sementara itu, segi kriteria yang dapat dipakai untuk mengukur dimensi efektivitas menurut Makmur (2015: 7) sebagai berikut:

1. Ketepatan penentuan waktu, dapat menghasilkan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi.
2. Ketepatan perhitungan biaya, adalah suatu kegiatan baik yang melekat pada individu, kegiatan yang melekat pada organisasi maupun yang melekat pada negara yang bersangkutan ketepatan dalam memanfaatkan biaya terhadap suatu kegiatan dalam arti bahwa tidak mengalami kekurangan.
3. Ketepatan dalam pengukuran, setiap kegiatan yang dilakukan senantiasa memiliki ukuran keberhasilan tertentu.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan, kesalahan dalam memiliki suatu pekerjaan, metode, benda, sahabat, pasangan, dan lain sebagainya berarti tindakan yang dilakukan itu gambaran ketidak efektifan serta kemungkinan menciptakan penyesalan di kemudian hari. Sebaliknya bahwa ketepatan memilih suatu kebutuhan atau keinginan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang bersangkutan dalam kehidupannya.
5. Ketepatan berfikir, adalah kelebihan manusia satu dengan yang lainnya sangat tergantung pada ketepatan berfikirnya, karena ketepatan berfikir dari berbagai aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun pada alam semesta yang senantiasa memberikan pengaruh yang sifatnya positif maupun negative.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah, keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satu tuntunan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan, organisasi apapun bentuknya akan selalu berusaha untuk mencapai tujuan yang telah mereka sepakati sebelumnya dan senantiasa dituangkan dalam sebuah dokumen secara tertulis yang sifatnya strategik.
8. Ketepatan ketepatan sasaran, adalah sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi.
Ukuran-ukuran untuk efektivitas, menurut Siagian (2015: 21) mengemukakan ukuran-ukuran efektivitas sebagai berikut:
 1. Ukuran waktu, yaitu berapa lama seseorang yang memperoleh jasa untuk memperolehnya.
 2. Ukuran harga, dalam arti seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh jasa yang dibutuhkannya itu.
 3. Ukuran nilai-nilai sosial budaya dalam arti cara penghasil jasa menyampaikan produknya kepada klientelennya.
 4. Ukuran ketelitian yang menunjukkan apakah jasa yang diberikan ukuran atau tidak.
 Menurut Siagian (2003: 35) mengatakan bahwa “Pelaporan merupakan catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan dengan kegiatan tertentu”. Agar pelaporan keuangan menjadi lebih efektif, seluruh informasi yang relevan seharusnya disajikan dengan cara yang

tidak memihak, dapat dipahami, dan tepat waktu. Adapun menurut Keraf (2001: 284) menjelaskan bahwa “Pelaporan adalah suatu cara komunikasi dimana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggungjawab yang dibebankan kepadanya”.

Dan menurut Kasmir (2014: 7) mengatakan bahwa “Pelaporan ataupun laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Choi (Jaffar et al, 2007: 20) mendefinisikan pelaporan informasi keuangan sebagai berikut: *Reporting of financial informations as a publication of economic informations which relate to businesses (quantitative or on-quantitative), that can help users in makin economic decisions*”. (Pelaporan informasi keuangan adalah suatu publikasi atas informasi ekonomi yang berhubungan dengan bisnis, baik bersifat kuantitatif ataupun kualitatif, yang membantu para pengguna dalam pengambilan keputusan). Sedangkan menurut Jonas dan Blanchet (2000: 355) menjelaskan bahwa “Pelaporan keuangan adalah suatu proses yang dimulai dari analisis suatu peristiwa atau transaksi, pemilihan kebijakan akuntansi, penerapan kebijakan terpilih, penetapan estimasi dan pertimbangan terkait serta pengungkapan (*disclosure*) tentang transaksi, peristiwa, kebijakan,

estimasi, dan pertimbangan tersebut di atas”.

Menurut Fahmi (2012: 5) mengatakan bahwa “Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan/ organisasi.

Menurut Susanto (2009: 18) menyatakan bahwa sistem adalah “sebagai kumpulan/ group dari bagian/ komponen apapun baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu”.

Sedangkan menurut Sutanta (2003: 4) mengemukakan bahwa “Sistem sebagai sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerjasama atau yang dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan”.

Menurut Susanto (2009: 40) mengemukakan bahwa informasi merupakan:

Hasil dari pengolahan data, akan tetapi tidak semua hasil dari pengolahan tersebut bisa menjadi informasi, hasil pengolahan data yang tidak memberikan makna atau arti serta tidak bermanfaat lagi bagi seseorang bukanlah merupakan informasi bagi orang tersebut.

Dari uraian tentang informasi ini ada tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Informasi merupakan hasil pengolahan data
2. Memberikan makna atau arti
3. Berguna atau bermanfaat dalam meningkatkan kepastian berkas

Pengukuran efektivitas pelaporan sistem keuangan desa bertujuan untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa agar lebih transparas dan akuntabel, karena dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan dalam pengelolaan keuangan desa.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau dengan penelitian deskriptif analisis. Lamayanya penelitian ini adalah 8 bulan. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari Kaur Keuangan Desa Karanganyar, Desa Kertabumi, Desa Bojongmengger, Desa Cijuengjing dan Desa Karangkamulyan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan serta studi lapangan terdiri dari observasi, wawancara, studi documenter. Teknik pengolahan data/ analisa data melalui reduksi data, display data, dan simpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. **Efektivitas Pelaporan Sistem Keuangan Desa Di Kecamatan Cijuengjing Kabupaten Ciamis**

Jumlah pegawai yang menangani pelaporan sistem keuangan desa dari ke 5 desa tersebut dilakukan oleh 1 atau 2 orang pelaksana kegiatan termasuk Kaur Keuangan desa dan Kaur Perencanaan. Penanggungjawab utama atas pelaporan sistem keuangan desa adalah Kepala desa sebagai penanggungjawab, Sekretaris desa sebagai verifikator, serta Kasi dan Kaur sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Pada dasarnya, para pelaksana kegiatan pelaporan sistem keuangan desa harus mampu mengoperasikan komputer/ IT, memahami bidang administrasi tata kelola keuangan dan ilmu akuntansi, mengetahui siklus penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa dan mampu memahami tata cara kerja aplikasi Siskeudes.

Penyusunan pelaporan sistem keuangan desa yang sudah optimal, karena dengan aplikasi Siskeudes sebelumnya diadakan pelatihan/BIMTEK terlebih dahulu untuk menambah kemampuan dan memahami tata cara bagaimana penggunaan aplikasi tersebut. Kemudian tidak lepas dari adanya koordinasi dengan kantor DPMD sudah sering dilakukan secara langsung ketika mengalami kesulitan dalam memasukkan data kedalam sistem keuangan desa tersebut.

Mengenai spesifikasi pada komputernya harus disesuaikan dengan spesifikasi servernya yaitu Window 10 Pro dengan intel for IT dan Ram yang digunakan sebesar 4GB, dan bisa juga

memakai Window 7 dan Microsoft Office 2007. Selain itu mesin pencetak (printer) yang digunakan tidak diwajibkan untuk memakai EPSON L565 tetapi tipe apa saja yang bisa dijadikan untuk mencetak laporan keuangan desa. Selanjutnya versi aplikasi sistem keuangan desa dengan menggunakan versi 21 sesuai dengan perintah Pemerintah Kabupaten, karena dari ke 5 desa tersebut sudah menerapkan versi terbaru yaitu versi 21.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai efektivitas pelaporan sistem keuangan desa belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Ditinjau dari aspek pelaksana (*actor*), pegawai pelaksana masih melakukan keterlambatan pada saat pengumpulan data/ berkas sehingga selanjutnya untuk penyusunan pelaporan keuangan desa akan terhambat, dan sering terjadi kesalahan pada saat penginputan data kedalam sistem keuangan desa. Selain itu juga harus diperlukan lebih banyak adanya pelatihan/BIMTEK secara serentak untuk seluruh perangkat desa tanpa terkecuali supaya semuanya paham atas aplikasi SISKEUDES. Kemudian ditinjau dari aspek aktivitas (*activity*) bahwa awal mula diterapkannya aplikasi SISKEUDES di tingkat Pemerintah Desa secara umum pegawai memiliki tingkat responsivitas yang baik terhadap pelaporan sistem keuangan desa dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES, karena sebelumnya masih mengerjakan dengan manual tanpa di input kedalam

aplikasi. Penerapan aplikasi SISKEUDES akan memberikan pekerjaannya lebih mudah, cepat dan tepat dalam penyusunan pelaporan keuangan desa karena sudah berbasis teknologi. Sementara itu, jika ditinjau dari aspek tempat (*place*) masih terdapat kebutuhan pendukung terutama dalam sarana dan prasana yaitu adanya ruangan khusus bagi pelaksana kegiatan pelaporan keuangan desa yang belum tertata sesuai dengan tata ruang kantor yang baik dan benar, karena dari ke 5 desa yang diteliti masih dalam satu ruangan dengan staff pekerja lainnya.

2. Hambatan dalam Pelaporan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai hambatan dalam pelaporan sistem keuangan ditinjau dari aspek pelaksana (*actor*), aktivitas (*activity*), tempat (*place*) adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja di dalam SISKEUDES, kebijakan yang sering berubah, serta penentuan kode rekening kegiatan sehingga harus dikoordinasikan kepada admin Kabupaten, kelaalaian pegawai pelaksana kegiatan yang belum paham dalam bidang IT terutama dalam proses penginputan data kedalam aplikasi SISKEUDES, kurangnya pelatihan/BIMTEK yang diperuntukkan bagi

- pegawai pelaksana yang menangani pelaporan sistem keuangan desa, dan kurangnya pemahaman tata cara kerja SISKEUDES maka sering terjadi kekeliruan pada saat penginputan data/berkas kedalam SISKEUDES.
2. Kurang melakukan koordinasi dengan bagian bidang lainnya karena kesibukan pekerjaan yang lain terutama dalam pelayanan masyarakat, kurang koordinasi antar perangkat desa, BPD, dan DPMD sehingga dalam pengawasan tidak terkendali karena kurangnya kerjasama antar satu sama lain, dan kurang adanya peran aktif dari bagian instansi terkait dengan monitoring/pengawasan karena gugus tugas/rantai komando yang tidak jelas sehingga fungsi dan tugasnya tidak berjalan dengan baik.
 3. Tidak adanya ruangan khusus untuk pelaksana pelaporan sistem keuangan desa, belum memadai dari luasnya ruangan untuk dikhususkan ruangan setiap bidang pekerjaan, sehingga tata ruangnya belum tertata dengan rapih, terbatasnya kelengkapan alat tulis kantor (ATIK) karena dana operasional yang belum memadai, dan kurangnya kemampuan dalam memahami sistem-sistem yang terdapat dalam spesifikasi komputer server dengan versi aplikasinya.
- 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaporan Sistem Keuangan Desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis**
- Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaporan sistem keuangan desa ditinjau dari aspek pelaksana (*actor*), aktivitas (*activity*), dan tempat (*place*), adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah desa melakukan kordinasi langsung dengan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), serta melaksanakan evaluasi dari setiap pelaporan keuangan desa, membantu satu sama lain antara pelaksana kegiatan agar terhindar dari kesalahpahaman. Kemudian diwajibkan untuk mengikutsertakan dalam pelatihan atau BIMTEK tentang pemahaman pengelolaan keiangan desa dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi agar kemampuan dan pengetahuan bertambah khususnya dalam bidang IT dan Administrasi baik itu dalam tata kelolanya ataupun administrasi keuangan tentunya ilmu akuntansi. Selanjutnya melakukan kordinasi antar pelaksana kegiatan dengan operator Siskeudes dari desa lain serta membentuk gugus tugas yang jelas dengan melakukan pertemuan dan musyawarah antara pelaksana kegiatan dengan

- pihak-pihak yang terlibat agar tugas dan fungsinya berjalan dengan baik.
2. Pemerintah desa mengadakan rapat evaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi setiap pelaksana kegiatan, kemudian memberikan penegasan kembali untuk operator Siskeudes dalam memahami fungsi *tools* dari aplikasi Siskeudes terutama dalam setiap Parameter yang ada dalam Siskeudes, meningkatkan kordinasi yang dilakukan dengan komunikasi yang lebih intens oleh pelaksana kegiatan, Kepala Desa, BPD, DPMD untuk pengawasan kegiatan pelaporan sistem keuangan desa, selanjutnya perlu dilakukan monitoring / pengawasan dari pimpinan desa, BPD, dan DPMD untuk menindaklanjuti laporan keuangan desa yang telah selesai serta melakukan pembatasan waktu bagi pelaksana kegiatan dalam pengumpulan data/berkas agar meningkatkan kedisiplinan dari segi waktu untuk pelaporan kegiatan dilapangan untuk menghindari keterlambatan pada saat penginputan data kedalam Siskeudes.
 3. Melakukan perawatan terhadap fasilitas yang ada di desa, mengganti peralatan printer yang sudah rusak, serta melakukan pengecekan isi tinta agar tidak

cepat mudah rusak pada mesin printer. Kemudian mengikuti instruksi Pemerintah Kabupaten terkait penggunaan spesifikasi komputer yaitu dengan Microsoft Word 10 yang disesuaikan dengan versi aplikasinya dan mengikuti BIMTEK kembali untuk memperjelas pemahaman dalam pemenuhan kebutuhan dalam spesifikasi versi jika ada pembaharuan dari versi lama ke versi baru. Selanjutnya dari ke 5 desa tersebut masih terdapat desa yang belum ada upaya dalam pemenuhan kebutuhan pegawai terutama hambatan dalam ruangan/ tempat kerja khusus untuk bagian keuangan yang menangani pelaporan keuangan desa karena terkendala kurangnya anggaran. Maka untuk saat ini upaya yang dilakukan hanya memaksimalkan dan memanfaatkan ruangan yang sudah ada meski disatukan dengan staff bagian pelayanan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan mengenai efektivitas pelaporan sistem keuangan desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas Pelaporan Sistem Keuangan Desa dari ke 5 desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis bahwa pada

- umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian menyatakan untuk pelaporan keuangan desa dalam penggunaan aplikasi Siskeudes sudah sesuai dengan ketentuan . Namun masih terdapat beberapa indikator yang belum berjalan optimal, sehingga dalam pelaksanaannya masih terjadi keterlambatan pada saat pengumpulan data/ berkas kepada operator sistem keuangan desa, kurangnya kemampuan dalam mengetahui spesifikasi antara komputer dengan versi aplikasi, kurangnya dana operasional untuk pemenuhan kebutuhan untuk pelaporan keuangan desa, kurangnya kordinasi dan peran aktif dari bagian monitoring yaitu pengawas.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam efektivitas pelaporan sistem keuangan desa dari ke 5 desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis yaitu kurangnya pemahaman tata kerja sistem keuangan desa yang terbatas, penginputan data yang kurang teliti, kurang koordinasi antar satu sama lain dari bagian pelaksana kegiatan, paku anggaran dari Kabupaten dan Pusat yang telat ditetapkan, kurang kordinasi antar perangkat desa dan lembaga desa yang terkait, dan kurang adanya peran aktif dari bagian instansi terkait dengan monitoring/ pengawasan, tidak adanya ruangan kerja khusus untuk pelaksana pelaporan sistem keuangan desa.
 3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Efektivitas Pelaporan Sistem Keuangan Desa dari ke 5 desa di Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis meliputi melakukan koordinasi langsung dengan DPMD apabila terjadi adanya kesalahan pada saat penginputan data, adanya jalinan kerja sama antara pelaksana kegiatan dengan pihak yang terlibat kedalam pelaporan sistem keuangan desa, adanya rapat evaluasi setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas kerja, memperkuat koordinasi antara pelaksana kegiatan, serta adanya peran aktif dari BPD untuk menindaklanjuti laporan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Draft, L Richard. (2007). *Manajemen Edisi Kelima Jilid 6*. Jakarta: Eirlangga.
- Fahmi Irham. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Kasmir. (2014). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Reflika Aditama.
- Sutanta, Edy. (2003). *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Siagian, Sondang P. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa.
- Susanto, Azhar. (2009). *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Lingga Jaya.